

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Karakteristik budaya yang dimiliki masyarakat adat merupakan salah satu hal yang menarik untuk ditilik dan dilihat lebih lanjut. Hal ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi alami serta memperkenalkan budaya adat di wilayahnya, salah satunya melalui pengembangan wisata (Rohani et al., 2018). Hal ini juga tertera dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang memaparkan bahwa pariwisata dilakukan berdasarkan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, kekeluargaan, adil dan merata, keberlanjutan, kesetaraan, serta demokrasi (Dinas Pariwisata DIY, 2014).

Sektor Pariwisata merupakan salah satu primadona dalam pembangunan industri dikembangkan dalam rangka lebih meningkatkan laju pembangunan nasional. Sektor kepariwisataan terbukti mampu menopang perekonomian rakyat dan sekarang ini keberadaannya sangat diperlukan dan merupakan salah satu sektor penting untuk memperoleh devisa dan pendapatan dari pemerintah hingga masyarakatnya (Hakim, 2016). Hal tersebut dapat diwujudkan melalui perencanaan pembangua kepariwisataan dengan melihat beberapa aspek penting seperti keunikan, keanekaragaman, potensi, karakteristik budaya, alam dan lingkungan, serta minat atau kebutuhan pariwisata (Djubaedah, 2019).

Hal tersebut diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2008 mengenai Penjabaran fungsi serta tugas dari struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo Kota Samarinda, pengaturan

mengenai kepariwisataan dalam pengembangan potensi daerah merupakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi (Arifin et al., 2017). Pengembangan wisata di sekitar wilayah Kota Samarinda menjadi urusan utama, salah satunya melalui program “Sadar Wisata SAPTA PESONA, Desa Budaya Pampang Samarinda” (Djubaedah, 2019).

Program “SAPTA PESONA” merupakan salah satu rencana kerja yang diorientasikan untuk industry wisata serta pendidikan budaya yang terkandung dalam praktek kesenian adat tersebut (Djubaedah, 2019). Program ini dicanangkan untuk beberapa daerah yang berpotensi dalam hal wisata, akan tetapi Desa Pampang menjadi salah satu objek wisata andalan yang ada di Samarinda. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah pengunjung yang datang bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari mancanegara, hal tersebut dapat dilihat seperti data dibawah ini:

Gambar 1. Jumlah Wisatawan Domesik dan Mancanegara Desa Pampang Tahun 2012- 2020

Tahun	W. Domestik	W. Mancanegara	Jumlah
2016	7096	652	7748
2017	28601	95	28696
2018	7359	33	7392
2019	14879	12	14891
2020	6045	0	6045

Sumber: (Dinas Pariwisata Kota Samarinda, 2020)

Dari data diatas kita dapat melihat bahwa Desa Budaya Pampang menjadi salah potensi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut S. Sarompai selaku Kepala Adat Desa Pampang, dampak yang paling terlihat dari adanya objek wisata ini ialah pembangunan infrastruktur, seperti pembukaan jalan, jalur listrik, air dan lainnya. Pengelolaan wisata yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa, Lembaga adat, beserta pengelola. Pengelolaan ini merupakan sesuatu hal penting yang berdampak untuk keberlangsungan objek wisata budaya ini (Pampang, 2020).

Secara kelembagaan program SAPTA PESONA di Desa Pampang, diturunkan langsung oleh dinas Pariwisata Kota Samarinda kepada Lembaga adat desa sebagai pengelola wisata satu- satunya, sebelum di lakukan pemecahan wilayah baru oleh pemerintah kota (Amirullah, 2015). Dari sisi pengelolaan wisata dilakukan oleh Lembaga adat bid. Kesenian dengan persetujuan kepala adat.

Dari segi administrasi Desa Pampang berada di dalam wilayah Kelurahan Pampang, yang dimana untuk urusan kenegaraan atau yang berhubungan langsung mengenai negara maka akan berurusan dengan pihak Kelurahan sedangkan apabila berkaitan dengan masyarakat adatnya sendiri dilakukan melalui lembaga adat (Pampang, 2020). Perubahan status Desa Pampang menjadi Kelurahan disahkan pada 12 Agustus 2014. Perubahan ini merupakan pemekaran dari wilayah Samarinda Utara yang mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Pemekaran Kelurahan (Amirullah, 2015). Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan pelayanan serta pembanguna di seluruh Kota Samarinda. Walaupun sudah disahkan menjadi Kelurahan dalam pelaksanaan pelantikan lurah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat oleh Kepala Adat (Amirullah, 2015).

Pengelolaan wisata budaya yang ada di Desa Pampang dilakukan oleh Pokdarwis bersama dengan Pemerintah Kelurahan serta Lembaga adat yang ada di dalamnya. Sebelumnya pengelolaan mengenai wisata budaya di laksanakan oleh bidang kesenian, akan tetapi sesuai dengan SK Dinas Pariwisata Nomor: 821.29/385/100.06 pengelolaan wisata budaya dilakukan oleh kelompok sadar wisata. Menurut Irene Helen selaku ketua Pokdarwis, dalam pengelolaan wisata budaya dilakukan oleh Pokdarwis sebagai perwakilan Lembaga adat, dan mengenai program pengembangan akan diajukan kepada Pemerintah kelurahan dalam program kerja Kelurahan (Helen, 2020). Dalam pengelolaan wisata ini, pemegang kendali utama berada Pokdarwis, akan tetapi dalam

penentuan programnya diajukan melalui perangkat kelurahan yang sebelumnya diteruskan melalui Kepala Adat selaku pemangku di daerah setempat (Helen, 2020). Kerjasama dalam pengelolaan sebuah program pengembangan wisata sangatlah dibutuhkan mengingat menjalankan sebuah kebijakan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dari satu pihak.

Pada pengelolaan wisata adat disini Lembaga adat berfungsi sebagai penasihat, dan kendali penuh berada pada Pokdarwis mulai dari perencanaan hingga eksekusi program pengembangan. Menurut (Sidhi et al., 2016) walaupun kewenangan dalam proses pengembangan wisata berada di tangan pengelola wisata seperti Pokdarwis, namun lembaga adat tetap memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi kinerja serta pengambilan keputusan program pengembangan wisata. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengembangan wisata adat di Desa Pampang, lembaga adat hanya bertugas sebagai penasihat dan simbolis sebagai pemangku adat. Hal itu tentu sedikit bertolak belakang dengan pengelolaan desa wisata adat di berbagai wilayah di Indonesia seperti Desa Panglipuran yang Lembaga adatnya memiliki peran utama dalam pengelolaan wisata adat (Sidhi et al., 2016).

Hal seperti diatas tentu sangat berpengaruh bagi keberhasilan dari program pengembangan mengingat Lembaga adatlh yang mengetahui mengenai seluk beluk dari wilayah tersebut (Pribadiono et al., 2016). Dari sisi koordinasi antara Pemerintah Kota dan pihak desa menurut Kepala adat Pampang kurang masiv dilakukan. Kurangnya koordinasi dan pengawasan yang terjalin antara lembaga adat dengan pemerintah Kota terhadap pengelolaan kepariwisataan juga menjadi salah satu permasalahan yang ada (Pampang, 2020).

Adanya fenomena mengenai pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat merupakan sebuah gebrakan besar yang dilakukan masyarakat guna mengkritik

system pengelolaan yang dilakukan tanpa masyarakat serta dipandang tidak mampu memberdayakan masyarakat sekitar (Purmada et al., 2016). Pariwisata yang berbasis community merupakan sebuah konsep yang dimana partisipasi aktif dari masyarakatnya lebih dikedepankan, hal ini bertujuan guna memberikan kesejahteraan dengan tetap menjaga lingkungan, serta melestarikan adat istiadat dan juga kehidupan sosial budaya dari wilayah itu sendiri. Secara garis besar pariwisata yang berbasis masyarakat ini sejalan dengan konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan yang dimana sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat lokalnya. Dalam penelitian (Baskoro & Rukrendi, 2010) mengatakan bahwa pariwisata berkelanjutan akan lebih mengedepankan pendekatan top-down, sedangkan pariwisata berbasis masyarakat akan lebih condong pada pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down yang dimaksud ialah berasal dari inisiatif pemerintah, sedangkan bottom-up berarti inisiatif yang berasal dari masyarakat guna mengembangkan pariwisata tersebut. Pengelolaan yang dilakukan masyarakat sangat penting karena hal ini dianggap mampu memberi manfaat terhadap masyarakat lokal melalui peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap kehidupan, sosial budaya, serta adat istiadat, dan juga melindungi lingkungan yang ada di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Adat Desa Pampang, tujuan awal dari adanya objek wisata ini selain untuk meningkatkan perekonomian juga melestarikan serta memperkenalkan budaya dayak yang ada di wilayah Samarinda mengingat Desa Pampang merupakan satu-satunya desa adat yang ada di kota tersebut (Pampang, 2020). Akan tetapi pada system pengelolaan perlu dilakukan dengan lebih intensif jika dilihat beberapa permasalahan yang ada dilapangan, seperti restribusi yang dipatok dinilai terlalu mahal terutama dalam hal berfoto dengan warga asli, hal ini tentu membuat pengunjung kurang leluasa. Prasarana yang kurang memadai mulai dari tempat duduk, toilet, dan

ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam hal pengelolaan (Arifin et al., 2017).

Apabila dilihat hal tersebut dapat menyebabkan penurunan tingkat wisatawan serta menimbulkan hambatan dalam pengembangan wisata adat, yang pada akhirnya juga berdampak pada penghasilan warga sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai petani di ladang. Campur tangan dari pemangku adat selaku tetua maupun petinggi adat sangat berpengaruh. Selain itu koordinasi juga sangat perlu dilakukan antara lembaga adat dengan Pemerintah kelurahan, serta pengelola wisata guna melancarkan jalannya program pengembangan wisata adat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus meninggalkan budaya asli dari suku Dayak ini.

Dari pemaparan diatas kemudian melandasi penulisan penelitian ini. Dengan penelitian ini, kajian akan diberikan untuk mengetahui bagaimana penerapan community governance pada pengelolaan wisata budaya Dayak Kenyah, di Desa Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur, yang diharapkan dapat mengembangkan wisata budaya ini dengan baik di kedepannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dengan tujuan untuk mengarahkan penulisan penelitian ini agar dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, Bagaimana penerapan community governance pada pengelolaan wisata budaya Dayak Kenyah, di Desa Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut digunakan sebagai tolok ukur dari suatu pelaksanaan penelitian, dan sebagai penilai keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui

bagaimana tingkat penerapan community governance pada pengelolaan wisata budaya Dayak Kenyah, di Desa Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga manfaat berupa ilmu pengetahuan, baik secara teoretis maupun praktis dalam bidang ilmu pemerintahan. Sebagaimana telah dituangkan dalam uraian berikut,

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan dalam bidang ilmu pemerintahan pada umumnya dan terhadap kemajuan pemerintahan daerah, khususnya di tingkat desa.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pustaka yang berfungsi sebagai bahan informasi ilmiah untuk pengembangan teori yang telah ada sebestumnya pada bidang ilmu pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh penulis sehingga memberikan manfaat bagi institusi tempat penulis mempelajari ilmu pemerintahan sebagai bidang perkuliahan selama ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang dinamis serta mengetahui kemampuan menulis dan menganalisis penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama berkuliah di bidang studi ilmu pemerintahan.
- c. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang menambah dan memperdalam wawasan bagi penulis dan masyarakat di sekitar terkait permasalahan yang diteliti yakni peran lembaga adat dalam

pengelolaan wisata budaya Desa Pampang, Kecamatan Samarinda Utara,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 10 literatur yang berbeda beda, tentu saja berkaitan dengan Peran Lembaga Adat Pada Pengelolaan Wisata Budaya Dayak Kenyah di Desa Adat Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam mengenal potensi desa menjadi nilai jual yang dapat mengangkat perekonomian dari masyarakatnya memanglah butuh dukungan yang besar dari berbagai pihak. Perlu adanya keterampilan oleh masyarakat desa yang ingin ataupun sudah melakukan pengembangan menjadi desa wisata. Perlunya peningkatan keterampilan serta pengetahuan mengenai hal tersebut (Susyanti & Latianingsih, 2017). Pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen konflik. Penerapan *community based tourism* dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan tingkat partisipasi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan dalam puncak tertinggi yaitu *citizen control* (Purmada et al., 2016).

Upaya pemberdayaan masyarakat terbagi dalam beberapa bentuk yang melibatkan partisipasi masyarakat, hal itu mulai dari langkah awal perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kendala yang ada dalam pengimplementasian upaya pemberdayaan masyarakat ialah mempertahankan budaya serta adat istiadat terhadap dampak globalisasi yang ada. Selain itu juga tingkat antusiasme masyarakat, ketersediaan SDM, kebutuhan akomodasi, kegiatan promosi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

desa wisata dapat memberikan dampak baik terhadap kelestarian sosial budaya melalui tatanan nilai sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar (Andayani et al., 2017). Selain hal tersebut (Pradana & Hilman, 2020) menyebutkan pengelolaan wisata bersama stakeholder menunjukkan pola kemitraan berbentuk inti-plasma. Pihak swasta sebagai penyedia lahan dan pihak pemerintah desa sebagai pelaksana dalam pengelolaan pariwisata. Dalam pembagian hasilnya menggunakan prinsip bagi hasil yang dimana hal tersebut terbukti dapat mengangkat perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pengembangan strategi desa wisata haruslah dilakukan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan pembangunan desa wisata dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, melibatkan masyarakat setempat, dan melaksanakan pembangunan pedesaan (Djubaedah, 2019). Perubahan status sebuah desa menjadi desa wisata memanglah mendapatkan dampak yang cukup signifikan salahsatunya membentuk perubahan pada gaya hidup masyarakat. Prinsip kebersamaan masyarakat perlahan-lahan mulai berubah seiring dengan kepemilikan bersama cenderung ke arah individual. Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan berdagang masyarakat dengan menjual berbagai kerajinan hasil dari kebudayaan material suku Kenyah (Hartanto, 2018).

Pembangunan objek wisata seperti Desa Pampang melibatkan partisipasi semua kalangan termasuk kaum muda. Partisipasi pemuda dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif dalam memberikan masukan, implementasi dan pelaksanaan seperti menampilkan tarian adat, membuat kerajinan tangan dan gotong royong serta partisipasi dalam menikmati hasil dan turut dalam melakukan evaluasi pengembangan

desa wisata (Nur, 2019). Hal tersebut juga didukung dalam penelitian (Rizqi et al., 2020) Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas yang diberikan sekitar lingkungan wisata pampang termasuk didalam goongan baik dengan presntase 61,1%. Dengan kontribusi yang didapatkan masyarakat suku dayak kenyah di kelurahan desa pampang terhadap tingkat pendapatan adalah untuk jumlah kontribusi terbanyak yang didapat responden sebanyak 85,71% dan jumlah kontribusi terendah yang didapat responden sebanyak 15.62%. akan tetapi dari segi pengelolaan wisata perlu adanya peningkatan serta pengelolaan yang lebih masiv untuk pemerintah maupun masyarakat sekitar..

Dalam hal pengelolaan yang ada di Desa Pampang memang belum optimal, upaya pembangunan wisata disana terdapat beberapa kendala yaitu kurang adanya manajemen profesional yang sinergis antara manajemen masyarakat adat dan manajemen kepariwisataan profesional yang dilakukan pemerintah/swasta; masalah anggaran dan pengelolaan yang belum memadai; masalah promosi masih belum optimal (DARMAWANTO & ZAINI, 2018). Pentingnya sinergi yang terjalin dalam suatu pengelolaan objek wisata mempengaruhi keberhasilan dari wilayah itu sendiri terutama bagi desa yang berbasis adat. desa adat sebagai pemilik aset pariwisata bertugas sebagai pembuat dan perancang kebijakan, sedangkan pengelola pariwisata bertugas melaksanakan kebijakan pariwisata tersebut dan desa adat berwenang untuk mengawasi segala kegiatan pariwisata(Sidhi et al., 2016).

Setelah memaparkan penelitian terdahulutersebut, penulis kemudian merincikan penjelasan dan judul dari seluruh penelitian terdahulu di atas dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1 Kajian Pustaka Terdahulu

No	Pengarang	Judul	Isi
1	(DARMAWANTO & ZAINI, 2018)	Development Of Pampang CULtural Village As A Tourism Atraction In The Samarinda City.	Pembangunan Desa Pampang sebagai objek wisata terbukti membawa beberapa peningkatan serta kemajuan dari segi attraction, amenities, maupun aksesnya. Dalam hal attractions masih perlu adanya peningkatan guna meningkatkan daya tarik dan atraksi untuk wisatawan, hal ini didukung juga dengan penyediaan fasilitas- fasilitas seperti restoran dan hotel. Dalam pembangunan wisata ini terdapat beberapa kendala yaitu kurang adanya manajemen profesional yang sinergis antara manajemen masyarakat adat dan manajemen kepariwisataan profesional yang dilakukan pemerintah/swasta; masalah anggaran (Budget) dan pengelolaan yang belum memadai; masalah promosi (komunikasi dan informasi) masih belum optimal
2	(Djubaedah, 2019)	Strategi Pengembangan Desa Wisata Sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Budaya	Pengembangan strategi desa wisata haruslah dilakukan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan pembangunan desa wisata dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat,

		Pampang Samarinda Utara	memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, melibatkan masyarakat setempat, dan melaksanakan pembangunan pedesaan.
3	(Rizqi et al., 2020)	Contribution of Dayak Cultural Tourism Regions to the Level of Income of Dayak Kenyah People	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas yang diberikan sekitar lingkungan wisata pampang termasuk didalam goongan baik dengan presntase 61,1%.Dengan kontribusi yang didapatkan masyarakat suku dayak kenyah di kelurahan desa pampang terhadap tingkat pendapatan adalah untuk jumlah kontribusi terbanyak yang didapat responden sebanyak 85,71% dan jumlah kontribusi terendah yang didapat responden sebanyak 15.62%. akan tetapi dari segi pengelolaan wisata perlu adanya peningkatan serta pengelolaan yang lebih masiv untuk pemerintah maupun masyarakat sekitar.
5	(Nur, 2019)	Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kelurahan Pampang Kecamatan	Partisipasi pemuda dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif dalam memberikan masukan, implementasi dan pelaksanaan seperti menampilkan tarian adat, membuat kerajinan tangan dan gotong royong serta partisipasi dalam menikmati hasil dan turut dalam melakukan evaluasi pengembangan desa

		Samarinda Utara Kota Samarinda	wisata. Selain itu diharapkan adanya peran serta dari pemerintah yang terkait khususnya dalam hal anggaran dana yang maksimal di setiap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk pemuda sebagai generasi penerus melestarikan kebudayaan dalam rangka pengembangan Desa Wisata Kelurahan Budaya Pampang. Karena pemerintah mendominasi segala proses keputusan.
4	(Purmada et al., 2016)	Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)	Pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen konflik. Penerapan <i>community based tourism</i> dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan tingkat partisipasi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan dalam puncak tertinggi yaitu citizen control.
6	(Andayani et al., 2017)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Dsa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Panglipuran Bali)	Dalam upaya pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa bentuk yang melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya, hal itu mulai dari langkah awal perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kendala yang ada dalam pengimplementasian upaya pemberdayaan masyarakat ialah mempertahankan budaya serta adat istiadat terhadap dampak globalisasi yang ada. Selain itu juga

			tingkat antusiasme masyarakat, ketersediaan SDM, kebutuhan akomodasi, kegiatan promosi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak baik terhadap kelestarian sosial budaya melalui tatanan nilai sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar.
7	(Susyanti & Latianingsih, 2017)	Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan	Dalam mengenal potensi desa menjadi nilai jual yang dapat mengangkat perekonomian dari masyarakatnya memanglah butuh dukungan yang besar dari berbagai pihak. Perlu adanya keterampilan oleh masyarakat desa yang ingin ataupun sudah melakukan pengembangan menjadi desa wisata. Perlunya peningkatan keterampilan serta pengetahuan mengenai hal tersebut.
8	(Pradana & Hilman, 2020)	Kemitraan Pemerintahan Desa Mandak Kabupaten Madiun dan Perhutani dalam Pengelolaan Pariwisata	Dalam pengelolaan wisata bersama pihak swasta maupun pemerintah daerah bisa melalui beberapa model, dalam studi kasus ini menunjukkan pola kemitraan berbentuk <i>inti-plasma</i> . Pihak swasta sebagai penyedia lahan dan pihak pemerintah dsa sebagai pelaksana dalam pengelolaan pariwisata. Dalam pembagian

			hasilnya menggunakan prinsip bagi hasil yang dimana hal tersebut terbukti dapat mengangkat perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
	(Hartanto, 2018)	<i>Kenyah Di Desa Budaya Pampang: Studi Kasus Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Tahun 1972 – 2015.</i>	Perubahan yang terjadi setelah Pampang menjadi desa budaya banyak ditimbulkan oleh pengaruh kegiatan pariwisata. Pariwisata yang menuntut masyarakat untuk melestarikan seni budaya mendorong banyaknya tingkat partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan kesenian. Kegiatan pariwisata juga membentuk perubahan pada gaya hidup masyarakat. Prinsip kebersamaan masyarakat perlahan-lahan mulai berubah seiring dengan kepemilikan bersama cenderung ke arah individual. Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan berdagang masyarakat dengan menjual berbagai kerajinan hasil dari kebudayaan material suku Kenyah.
10	(Sidhi et al., 2016)	Sinergi Desa Adat Dan Pengelolaan Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Panglipuran	Kondisi eksisting dari Desa Wisata Panglipuran meliputi, kondisi fisik dan kondisi non-fisik. Sinergi desa adat dan pengelola pariwisata Panglipuran dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Panglipuran adalah desa adat

			sebagai pemilik aset pariwisata bertugas sebagai pembuat dan perancang kebijakan, sedangkan pengelola pariwisata bertugas melaksanakan kebijakan pariwisata tersebut dan desa adat berwenang untuk mengawasi segala kegiatan pariwisata di Desa Wisata Penglipuran
--	--	--	--

Dari pemaparan beberapa jurnal yang ditemui terdapat beberapa persamaan yaitu membahas tentang kedudukan desa umum ataupun adat, beserta lembaga adat yang ada di dalamnya. Selain itu jurnal- jurnal diatas membahas mengenai pengembangan desa serta peningkatan taraf ekonomi serta kesejahteraan masyarakatnya salah satunya melalui kegiatan pariwisata/ pemanfaatan dana desa. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian kami ingin melihat bagaimana peran lembaga adat dalam pengelolaan wisata budaya yang ada di Desa Pampang, mengingat dalam pengelolaan desa wisata tersebut juga ada Pokdarwis serta Kelurahan selaku lembaga pemerintahan yang mengurus urusan kenegaraan di desa tersebut.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Community Governance

Secara konsep dan garis besar *community governance* memiliki kemiripan dengan partisipasi kelompok/ komunitas/ grup dan masyarakat srta melibatkan masyarakat dalam pembuatan maupun pengambilan suatu kebijakan public. Selain itu juga *community governance* berhubungan erat dengan peran masyarakat local dalam tata kelola lingkungan masyarakat, sehingga mereka berperan sbagai pemerintah di bidang sosial serta peran dalam menjalain hubungan dan keterlibatan masyarakat (Pratomo, 2018).

Literature mengenai *community governance* tidak terlepas dari makna “governance” yang

berkaitan dengan tata kelola suatu pemerintahan. Secara teoritis menurut (Totikidis et al., 2005) community governance ialah proses dimana pengambilan keputusan yang berada pada ranah komunitas atau mengatasnamakan kelompok maupun komunitas yang dilakukan secara kolektif dan bersamaan oleh seluruh pejabat atau pemangku kepentingan dalam komunitas itu sendiri.

Community Governance didefinisikan sebagai proses manajemen tahap komunitas dalam pengambilan keputusan, dengan mempertemukan komunitas dengan pemangku kebijakan. Fokus dari komunitas seperti perusahaan, organisasi, pemerintah lokal dan komunitas sektor publik dengan ciri mempertemukan kedua belah pihak (Totikidis et al., 2005). Masyarakat dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah ketika Pasar mengalami kegagalan dan Kebijakan Pemerintah tidak berdampak terhadap kondisi masyarakat, dengan tidak adanya kepercayaan dengan pemerintah dan Swasta maka peran masyarakat untuk saling bekerjasama dan menguntungkan antar sesama dengan perangkat norma dan kebiasaan akan menutupi gagalannya pihak pemerintah dan Swasta (Bowles & Gintis, 2002).

Dalam menganalisis gagasan mengenai community governance terdapat 5 unsur utama (Safitri, Aprilia, 2014), yaitu:

- a. Tata kelola ini lebih condong pada keterkaitan suatu institusi dengan seseorang yang berasal dari eksternal maupun internal pemerintah desa itu sendiri
- b. Tata kelola ini mengidentifikasi isu- isu yang masih abu- abu serta akuntabilitas terutama isu sosial dan ekonomi
- c. Tata kelola ini mengamati tingkat dominasi dari sebuah kekuasaan institusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan

- d. Tata kelola ini mengamati jaringan- jaringan yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan yang bersifat self governing atau dikelola sendiri secara otonom
- e. Governance ini mengakui tingkat kapasitas guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan tanpa perlu mengantungkan kepada pemerintah. Pemerintah hanya berperan sebagai pengarah karena memiliki strategi, Teknik dan fasilitas dalam membina masyarakat sesuai dengan apa yang dicanangkan melalui sebuah musyawarah bersama

Selama kurun waktu dua dekade ini, aktifitas kolektif dari masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan derajat sosial-ekonomi mereka semakin meningkat. Beberapa organisasi terbentuk secara spontan, dan biasanya terbentuk dari masyarakat itu sendiri. Namun, juga ada organisasi yang terbentuk karena faktor eksternal (Bowles & Gintis, 2002). Dalam proses ini swasta dan masyarakat memiliki peran besar dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, selain itu terciptanya sinergitas yang baik antara masyarakat dan swasta dapat mendorong percepatan terwujudnya gagasan *community governance* secara baik (Kushandajani, 2016).

Community governance adalah kesadaran dari dalam masyarakat untuk menggerakkan masyarakat itu sendiri secara kolektif, dengan tujuan untuk merubah keadaan sosial- ekonomi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan peran pemerintah dan swasta. Community Governance dalam prakteknya tidak mungkin terpisahkan dari konsep modal sosial (social capital). Banyak Teori yang menjelaskan tentang apa itu modal sosial (social Capital). Pertama, (Murdoch & Abram, 1998) mengemukakan bahwa modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya, baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada rasa saling kenal dan saling mengakui. Selanjutnya, (Bowles & Gintis, 2002) memperkenalkan konsep modal sosial yang

mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti harta kekayaan atau uang tetapi lebih mengandung arti yang implisit. Modal Sosial (Social Capital) merupakan aset nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, hubungan sosial, kerjasama dan sebagainya (Alfitri, 2011).

Tata pengelolaan komunitas muncul karena fragmentasi dalam sektor pemerintah lokal, fragmentasi ini muncul bersama dengan lembaga- lembaga yang mempunyai tujuan khusus misalnya kes ehatan, pendidikan dan sektor pertanian yang menciptakan fragmentasi dengan mengaburkan tanggung jawab dari bagianbagian dari fungsi pemerintah itu sendiri.

Fragmentasi karena tata kelola komunitas lebih rumit karena bersinggungan dengan fungsi dan tujuan dari sektor publik sendiri (Bahtera & Hayati, 2018).

Menurut Clarke and Stewart (1998) terdapat 6 prinsip utama dalam community govrnance di pemerintahan local, yaitu:

- a. Perhatian dari otoritas lokal harus memaksimalkan pelayanan publik dengan tujuan kesejahteraan masyarakat daerah
- b. Pemerintah local hanya berperan sebagai pemeberdaya komunitas, mulai dari komunitas itu sendiri ataupun masyarakat sekitar.
- c. Dalam prosesnya pemerintah local dilarang untuk mngintervensi kontribusi yang ada dari organisasi serta mengakui adanya keterlibatan swasta dan sukarelawan
- d. Pemerintah setempat memastikan kegunaan serta fungsi dari sumber daya yang ada, yaitu befungsi guna mensejahterakan daerah itu sendiri
- e. Pemerintah lokal harus bisa meninjau dengan seksama kebutuhan paling penting untuk dipenuhi masyarkat dan menyiapkan langkah untuk mewujudkannya

- f. Dalam menunjukkan pengaruh kepemimpinannya, pemerintah lokal harus berusaha untuk mendamaikan, menyeimbangkan keragaman kepentingan di semua sektor

Dari pemaparan diatas Clarke and Steart (1998) bahwa pendekatan dan prinsip tata kelola komunitas merupakan kebutuhan akan kekuasaan yang harus sedekat mungkin dengan masyarakat dan komunitas lokal. Hal ini diprakarsai oleh proses desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah dalam usaha penyelesaian permasalahan di tingkat lokal dan lebih kepada masyarakat itu sendiri (Putri, 2018).

Menurut (Bowles & Gintis, 2002) menggunakan istilah *community governance* sebagai alternatif "modal sosial" yang mengklaim bahwa lebih baik pemerintahan memfokuskan perhatian pada apa yang kelompok lakukan daripada apa yang dimiliki orang. Menurut mereka: "Masyarakat adalah bagian dari pemerintahan. karena mereka mengatasi masalah-masalah tertentu yang tidak dapat ditangani oleh individu atau oleh pasar dan pemerintah".

Selain itu dalam (Totikidis et al., 2005) terdapat tiga elemen dari model yang efektif yaitu:

- a. Keikutsertaan masyarakat, yaitu dalam arti luas penggunaan masyarakat untuk menerjemahkan, individu, kelompok, organisasi non-profit dan masyarakat ekonomi.
- b. Tolak ukur kinerja, yaitu Indikator dan pengumpulan data untuk menggambarkan, melaporkan, dan menganalisis kinerja. Pengukuran dapat dilakukan untuk pelayanan publik atau kondisi komunitas (misalnya, kondisi fisik atau lingkungan, kesehatan dan keselamatan publik, atau kondisi ekonomi dan sosial) atau keduanya.
- c. Kebijakan pemerintah dan penerapan kebijakan, yaitu Perkembangan keputusan kebijakan publik tentang isu yang dipilih pemerintah untuk diatasi seperti, strategi yang digunakan, sumber daya yang dilakukan, dan tindakan yang

diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini. Elemen ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintah

Peran organisasi komunitas didefinisikan bahwa organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam tata kelola sosial dan pengembangan kebijakan dan program sosial. Organisasi masyarakat yang diargumentasikan sangat berhubungan dengan kebutuhan dan kekuatan masyarakat, dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan dapat memberikan struktur formal untuk memberikan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah (Stanley, 2004).

Selain itu dalam pengembangan teori atau model mengenai community governance di dunia barat sring menjadi pembicaraan. Dewan Kota Auckland (2002) di New Zland telah mengembangkan posisi yang komprehensif tentang tata kelola komunitas yang memasukkan model tata kelola komunitas yang dirangkum dibawah:

- a. Community Leadership, yang dimaksud disini ialah kepemimpinan komunitas mencerminkan konsep orang dan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan visi. Hal ini mencakup visi dan pemahaman, partisipasi masyarakat, masyarakat yang koperatif, advokasi terhadap masyarakat
- b. Community Empowerment, yang dimaksud disini komunitas yang dapat mengakses atau memiliki sumber daya yang dibutuhkan guna memenuhi berbagai keperluan dasar (misalnya makanan, tempat tinggal, pendapatan) ke kebutuhan tingkat yang lebih tinggi (mis. interaksi sosial, dukungan, pengembangan diri). Hubungan antara sosial dan modal ekonomi, oleh karena itu dibuat sangat jelas di sini.
- c. Community Ownership, bagian dalam model mencakup cara orang berhubungan dengan komunitas mereka sehingga menimbulkan rasa memiliki

dan menjaga dalam hati masyarakatnya. Hal ini seperti rasa memiliki, peduli, rasa kesetaraan, dan menghargai keberagaman yang ada disekitarnya.

Menurut Dewan ini, model tersebut memberikan kerangka kerja untuk kegiatan peran Dewan, mengartikulasikan pentingnya hal itu pada orang dan komunitas dan mengidentifikasi cara-cara bertindak berdasarkan nilai dan prinsip. Selain itu menurut (Marshall, Wray, & Epstein, 2000) model lain dalam tata kelola komunitas juga banyak terjadi di berbagai negara bagian Amerika yang digunakan dalam berbagai isu- isu sosial, ekonomi, hingga pelayanan public. Model ini mencakup 3 elemen tata kelola yang efektif, yaitu:

- a. Keikutsertaan masyarakat, yaitu keikutsertaan dalam arti luas penggunaan masyarakat, individu, kelompok, organisasi non-profit dan masyarakat ekonomi, guna menjalankan suatu kegiatan
- b. Tolak ukur kinerja, yaitu Indikator dan pengumpulan data untuk menggambarkan, melaporkan, dan menganalisis kinerja. Pengukuran dapat dilakukan untuk pelayanan publik atau kondisi komunitas (misalnya, kondisi fisik atau lingkungan, kesehatan dan keselamatan publik, atau kondisi ekonomi dan sosial) atau keduanya.
- c. Kebijakan pemerintah dan penerapan kebijakan, yaitu Perkembangan keputusan kebijakan publik tentang isu yang dipilih pemerintah untuk diatasi seperti, strategi yang digunakan, sumber daya yang dilakukan, dan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini. Elemen ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintah.

1.6.2 Pariwisata

Istilah “pariwisata” kerap berhubungan erat dengan definisi sebuah perjalanan wisata, yaitu perubahan tempat tinggal seseorang yang bersifat sementara diluar tempat

tinggal aslinya karena sebuah alasan dan bukan sebuah kegiatan yang menghasilkan upah. Maka dari penjelasan tersebut pariwisata ialah sebuah perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan tujuan guna mendapatkan ketenangan, kenikmatan ataupun hasrat terhadap sesuatu. Selain hal tersebut bisa juga didasari kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, keagamaan, konvensi, ataupun kepentingan usaha lainnya (Gamal, 2014). Hal tersebut juga selaras dengan pendapat (Pendit, 2010) yang mengatakan bahwa pariwisata ialah sebuah kegiatan dari seseorang yang berpergian dari tempat satu menuju tempat yang lain diluar tempat tinggalnya, yang didorong berbagai alasan seperti kepentingan politik, sosial, ekonomi, agama, Kesehatan, atau kepentingan serta rasa ingin tahu dalam proses penambahan pengalaman maupun pengetahuan.

Dalam UU kepariwisataan Nomor 10 Th 2009, pariwisata ialah semua kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata serta bersifat multidisipli dan multidisiplin yang akan muncul sebagai bentuk dari kebutuhan semua orang yang berinteraksi antara wisatawan dan masyarakat sekitar tempat wisata, sesama wisatawan, pemerintah daerah, pemerintah dan juga perusahaan. Menurut Spillane (1987) terdapat beberapa jenis pariwisata, yaitu:

a. **Pleasure Tourism**

Pleasure tourism merupakan jenis pariwisata yang biasa dilakukan orang-orang dalam meninggalkan tempat tinggalnya guna mencari udara segar, mengurasi beban ataupun ketegangan dalam dirinya, untuk memenuhi rasa penasaran akan hal dan melihat sesuatu yang baru, serta untuk melihat keindahan alam maupun mengganti suasana perkotaan

b. **Recreation Tourism**

Recreation tourism merupakan jenis wisata yang dilakukan akibat adanya rasa ingin tau terhadap suatu budaya, adat istiadat, kelembagaan, dan tata cara hidup masyarakat daerah lain. Selain hal tersebut biasanya tipe wisata

ini lebih bersifat menambah pengetahuan menuju temat bersejarah seperti monumen, pusat kesenian, peninggalan peradaban nenek moyang, pusat keagamaan, festival seni, music, teater, tarian rakyat tradisional ataupun yang lainnya.

c. Cultural Tourism

Cultural tourism dan recreation memiliki pengertian yang hampir serupa yaitu jenis wisata yang dilakukan akibat adanya rasa ingin tau terhadap suatu budaya, adat istiadat, kelembagaan, dan tata cara hidup masyarakat daerah lain. Selain hal tersebut biasanya tipe wisata ini lebih bersifat menambah pengetahuan menuju temat bersejarah seperti monumen, pusat kesenian, peninggalan peradaban nenek moyang, pusat keagamaan, festival seni, music, teater, tarian rakyat tradisional ataupun yang lainnya.

d. Sport Tourism

Jenis wisata sport tourism dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Big Sport Event yang dimana perjalanan ini dilakukan akibat adanya peristiwa olahraga besar seperti Olympiad Games, World Cup, dan berbagai pertandingan nasional maupun internasional. Tipe selanjutnya ialah Sporting Tourism of the Practitioner atau wisata olahraga guna melatih serta mempraktikannya sendiri, seperti hiking/ mendaki gunung, panjat tebing, olahraga berkuda, dan yang lainnya.

e. Business Tourism

Business tourism biasa juga disebut perjalanan bisnis, hal ini biasanya terjadi pada travel atau professional travel karena mereka berkaitan dengan berbagai

pekerjaan maupun tanggung jawab tanpa bisa memilih daerah tujuan serta menentukan waktu perjalanannya.

f. Convention Tourism

Convention tourism merupakan sebuah konvensi yang dihadiri oleh banyak orang yang berasal dari berbagai daerah maupun negara, dan mereka menetap disuatu daerah atau negara yang telah ditinggalkan selama beberapa hari.

1.6.3 Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013) lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur pengendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu :

- a. Mengatur diri pribadi manusia agar dia dapat bersih dari perasaan iri, dengki, benci dan hal-hal lain yang menyangkut kesucian hati nurani.
- b. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar terciptanya pola kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Sementara menurut Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang (2013), pada dasarnya lembaga adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, tentang bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah pada kehidupan bermasyarakat.
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Dalam hal ini manusia diharapkan bisa berbuat sesuai dengan norma dengan kata lain bersikap sopan dan ramah terhadap orang lain, hal ini dilakukan agar tercipta suatu perdamaian serta kerukunan yang terjalin di kehidupan sehari-hari. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literature tersebut lembaga bisa diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan, sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur adat yang relevan.

Lembaga adat menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau didalam suatu hukum adat masyarakat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat

yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat (Suhartadi, 2020).

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1 Community Governance

Community Governance didefinisikan sebagai proses manajemen tahap komunitas dalam pengambilan keputusan, dengan mempertemukan komunitas dengan pemangku kebijakan. *community governance* berhubungan erat dengan peran masyarakat local dalam tata kelola lingkungan masyarakat, sehingga mereka berperan sbagai pemerintah di bidang sosial serta peran dalam menjalain hubungan dan keterlibatan masyarakat

1.7.2 Pariwisata

Pariwisata ialah sebuah perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok dngan tujuan guna mendapatkan ketenangan, kenikmatan ataupun hastrat terhadap sesuatu. Selain hal tersebut bisa juga di dasari kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, keagamaan, konvesi, ataupun kepentingn usaha lainnya

1.7.3 Lembaga Adat

Lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan pada pola perilaku manusia yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

1.8. Definisi Operasional

	Variable	Indikator
Community Governance Dalam Pengelolaan Wisata Adat Desa Pampang	➤ Keikutsertaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">➤ Partisipasi awal proses kepariwisataan➤ Partisipasi dalam proses perencanaan➤ Partisipasi dalam pelaksanaan➤ Partisipasi dalam pengembangan
	➤ Implementasi pelaksanaan pengembangan	<ul style="list-style-type: none">➤ Pelaksanaan program kerja setiap sektor➤ Pelayanan publik serta kondisi masyarakat adat
	➤ Tolak ukur kinerja	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengumpulan data serta analisis mengenai pelaksanaan program atau kinerja setiap sektor➤ Pelayanan publik serta kondisi masyarakat adat (ex: kondisi lingkungan, fisik, pelayanan masyarakat desa, serta kondisi ekonomi sosial)

1.9. Metode Penelitian

Sebuah penelitian haruslah memperhatikan bagaimana metode penelitian itu akan dibuat. Dalam hal ini, agar suatu penelitian berjalan baik maka perlu menggunakan metode penelitian sebagai dasar landasan dalam mencapai hal yang diinginkan. Dalam metode penelitian, setidaknya terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan, di antaranya data, tujuan, cara, dan kegunaan. Masing-masing penelitian memiliki metodenya tersendiri dalam mengkaji sebuah permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut;

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Menurut Denzin & Lincoln sebagaimana dikutip oleh (Anggito, 2018), penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan penafsiran fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun fokus dari penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.

Hasil dari penelitian jenis ini bersifat induktif/kualitatif, yang berupa penekanan makna secara generalisasi. Suatu fenomena akan lebih dijelaskan secara deskriptif dan lebih diberatkan pada pengujian kebenaran akan sebuah teori. Penelitian ini sangat cocok untuk menjelaskan gejala-gejala dan fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dan cenderung adaptatif cocok bagi berbagai bidang ilmu sosial (Anggito, 2018).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Adat Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun tempat khusus di mana akan dilakukan pengambilan datanya sendiri adalah pada Kantor Pemerintahan Desa Pampang.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah berupa wawancara dan observasi. Adapun data yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

➤ Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan (lokasi penelitian). Nantinya penulis akan melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa pihak dalam Pemerintahan Desa Pampang. Adapun informan yang sudah ditetapkan oleh penulis dalam wawancara tersebut sebagai berikut;

Tabel 2 Data Informan Wawancara

Narasumber	Jabatan
Pemerintah Kelurahan Pampang	Lurah Desa Pampang
Lembaga Adat	Kepala Adat
Masyarakat Umum	penerima manfaat (pedagang), masyarakat setempat
Pokdarwis	Ketua Pokdarwis

➤ Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat kedudukan data primer. Data sekunder yang ingin digunakan penulis berasal dari studi literasi terdahulu yang didapatkan dari buku, artikel jurnal, lembaran negara dan peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan-pemberitaan media massa.

1.9.4 Teknik Analisis Data

Menurut Hadi (1986), teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, survey, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-ata terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian di kaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun metode yang dapat di gunakan dalam analisis data ialah metode induktif yang merupakan suatu pengambilan kesimpulan melalui data khusus yang di lanaskan fakta konkret untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun rincian dari teknik analisa data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan ataupun melalui penelitian sbelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis ini mampu menajamkan, menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil yang dapat diverifikasi. Data kualitatif yang di hasilkan dari reduksi ini akan lebih mudah untuk disederhanakan dan transformasikan melalui berbagai macam cara, yaitu: seleksi, penggolongan, ringkasan agar mendapatkan hasil yang singkat dengan satu pola yang luas.

2. Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan, maka penulis melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan.

3. Matriks kesimpulan

Matrik kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini.